




Implementasi Akuntansi Keuangan Sektor Publik pada Instansi Pemerintah

Evi Susanti^{1*}, Hagmy Nurma Yolandasari¹, Putri Meilani¹, Sugiyanto¹

¹ Universitas Pamulang Banten, Indonesia

 evsusangi1622@gmail.com*

Abstract

Implementation refers to concrete steps and the process of applying a concept, plan, or solution into real-world practice. In the context of the public sector, implementation includes the process of applying policies, programs, or projects within government or public institutions. The implementation process requires coordination, resource management, and continuous evaluation to ensure the success of the application. Financial accounting implementation in the public sector plays a crucial role in supporting transparency, accountability, and efficiency in managing public entity finances. However, government agencies often face complex challenges in implementing financial accounting systems, such as complex regulations, unclear procedures, and the need for adequate resources. Therefore, this research aims to explore and analyze the implementation of financial accounting in government institutions to identify specific barriers and provide recommendations to improve the effectiveness and efficiency of financial accounting systems in the public sector.

Keywords: Public Sector Accounting, A Government Agency, Accounting

ARTICLE INFO

Article history:

Received
September 03,
2024
Revised
October 20,
2024
Accepted
November 05,
2023

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Implementasi merujuk pada langkah-langkah konkret dan proses penerapan suatu konsep, rencana, atau solusi ke dalam praktik nyata. Ini melibatkan eksekusi atau penggunaan dari ide atau rancangan yang telah dirancang sebelumnya. Dalam konteks teknologi atau perangkat lunak, implementasi seringkali mencakup pengkodean dan pengujian aplikasi yang dikembangkan untuk memastikan bahwa itu berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Namun, implementasi tidak terbatas pada bidang teknologi; itu juga dapat merujuk pada penerapan kebijakan, strategi bisnis, atau proyek dalam berbagai konteks (Kamal, 2023). Proses implementasi memerlukan koordinasi, manajemen sumber daya, dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan keberhasilan penerapan tersebut. Sebuah implementasi yang efektif biasanya melibatkan tim kerja yang terkoordinasi dengan baik, komunikasi yang jelas, dan pemantauan progres secara rutin untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Anggraini et al., 2020).

Implementasi dalam konteks sektor publik mencakup proses penerapan kebijakan, program, atau proyek dalam lingkup pemerintahan atau lembaga-lembaga publik. Ini melibatkan konversi rencana dan strategi menjadi tindakan nyata yang dapat memberikan dampak positif pada masyarakat atau organisasi

yang dilayani. Proses implementasi di sektor publik melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat, pembuatan regulasi yang sesuai, dan koordinasi efektif antara berbagai level pemerintahan dan sektor terkait. Faktor penting dalam implementasi di sektor publik melibatkan partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa kebijakan atau program yang diimplementasikan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi serta untuk melakukan perubahan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan masyarakat. Implementasi yang baik di sektor publik dapat meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi pemerintahan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sektor publik di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam bidang akuntansi. Perubahan ini terjadi sebagai respons terhadap dinamika global, tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, dan kebutuhan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah reformasi khusus di sektor akuntansi publik sebagai upaya untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Reformasi ini bertujuan utama untuk memastikan bahwa praktik akuntansi yang diterapkan mencerminkan prinsip-prinsip keuangan yang baik dan berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan sistem akuntansi yang lebih responsif, efisien, dan terpercaya dalam mendukung pengelolaan keuangan publik yang lebih baik.

Perkembangan signifikan ini telah mengungkapkan kelemahan dan keterbatasan dalam sistem akuntansi sektor publik yang ada. Mulai dari pelaporan yang tidak konsisten, kurangnya transparansi dalam alokasi dan penggunaan dana publik, serta tingginya tingkat risiko terkait kebijakan fiskal menjadi perhatian utama. Ross H. McLeod dan Harun Harun, dalam jurnal *Public Sector Accounting Reform At Local Government Level In Indonesia*, menyatakan bahwa reformasi akuntansi sektor publik mengalami hambatan serius akibat kurangnya staf dengan keterampilan akuntansi yang memadai, yang diperparah oleh keputusan untuk terus menyusun laporan berbasis kas tradisional bersamaan dengan laporan berbasis akrual baru. Mereka juga menunjukkan bahaya meniru teknik manajemen keuangan sektor publik dari konteks negara yang berbeda, terutama ketika terdapat perbedaan pendapat yang signifikan mengenai desain reformasi ini di antara lembaga kebijakan yang berpengaruh.

Pentingnya tata kelola keuangan dalam suatu instansi pemerintah mencerminkan respons terhadap perubahan dinamika pengelolaan dana publik yang semakin kompleks dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan urgensi tata kelola keuangan telah menjadi sorotan utama di berbagai tingkatan pemerintahan. Tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik menjadi landasan bagi implementasi akuntansi keuangan di sektor publik. Dalam konteks ini, instansi pemerintah memegang peran sentral sebagai penyelenggara pelayanan publik dan pengelola dana yang bersumber dari pajak dan pendapatan negara. Kemampuan instansi pemerintah untuk menjalankan sistem akuntansi keuangan yang baik dan sesuai standar bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga sebuah kebutuhan mendesak. Transparansi menjadi kunci untuk membuka akses masyarakat terhadap informasi terkait penggunaan dana publik, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa keputusan-keputusan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Efisiensi dalam pengelolaan dana publik juga menjadi tujuan utama, di mana implementasi akuntansi keuangan yang efektif dapat mengoptimalkan alokasi dana, mencegah penyimpangan, dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Dengan dana yang berasal dari pajak dan pendapatan negara, masyarakat mengharapkan agar instansi pemerintah menjalankan fungsi keuangannya dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, tata kelola keuangan yang baik di sektor publik bukan hanya menjadi tanggung jawab administratif semata, melainkan juga merupakan fondasi yang mendukung kepercayaan masyarakat. Dengan menjalankan sistem akuntansi keuangan yang baik, instansi pemerintah dapat membuktikan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang menciptakan lingkungan yang akuntabel, transparan, dan efisien dalam pengelolaan dana publik.

Meskipun pentingnya akuntansi keuangan diakui secara umum, instansi pemerintah seringkali menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan. Regulasi yang kompleks, ketidakjelasan prosedur, dan kebutuhan akan sumber daya yang memadai merupakan beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pemerintah. Kompleksitas regulasi seringkali menciptakan kesulitan dalam pemahaman dan penerapan standar akuntansi yang berlaku, sementara ketidakjelasan prosedur dapat mengakibatkan ketidakefisienan dan keraguan dalam pelaporan keuangan. Tantangan lain yang signifikan adalah kebutuhan akan sumber daya yang memadai, termasuk tenaga ahli dan infrastruktur teknologi. Penerapan sistem akuntansi keuangan yang efektif memerlukan personel yang terlatih dengan baik untuk mengelola, memonitor, dan melaporkan informasi keuangan dengan akurat. Selain itu, infrastruktur teknologi yang memadai menjadi kunci dalam mendukung proses akuntansi modern.

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, penulisan artikel dengan judul "Implementasi Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pada Instansi Pemerintah" bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam dan menganalisis implementasi akuntansi keuangan pada instansi pemerintah guna mengidentifikasi hambatan-hambatan konkret yang dihadapi. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem akuntansi keuangan di sektor publik.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang terus berkembang, pengelolaan keuangan di sektor publik menjadi semakin kompleks dan menuntut standar yang lebih tinggi. Akuntansi keuangan sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen yang penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Hal ini menjadi sangat relevan di Indonesia, mana kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh seberapa baik pengelolaan keuangan dilakukan.

Penerapan prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang baik di instansi pemerintah menjadi suatu keharusan, mengingat lembaga pemerintah bertanggung jawab atas dana yang bersumber dari pajak dan pendapatan negara. Implementasi yang efektif tidak hanya akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa penerapan akuntansi keuangan tidak hanya berkaitan dengan penerapan prosedur teknis, tetapi juga melibatkan aspek manajerial dan kebijakan. Keterlibatan berbagai pemangku

kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sistem akuntansi yang baik di sektor publik seharusnya mampu memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan untuk merencanakan dan menyebarkan program-program yang ada. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang tantangan dan hambatan dalam penyelenggaraan akuntansi keuangan di instansi pemerintah sangat diperlukan agar reformasi yang dilakukan dapat berjalan efektif.

Dengan latar belakang tersebut, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis implementasi akuntansi keuangan pada instansi pemerintah. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai hambatan konkret yang menghadang dalam proses implementasi dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem akuntansi keuangan di sektor publik.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan entitas publik, seperti pemerintah dan lembaga-lembaga non-profit. Tujuan utama dari akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan, dapat diandalkan, dan transparan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan dana publik. Proses akuntansi ini mencakup pencatatan, pelaporan, dan analisis transaksi keuangan entitas publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran dana serta aset dan kewajiban yang terkait. Khususnya di sektor publik, akuntansi juga mencerminkan prinsip akuntabilitas, di mana entitas harus bertanggung jawab atas penggunaan dana publik dengan efisien dan efektif. Standar akuntansi sektor publik biasanya disusun untuk mencerminkan karakteristik khusus entitas publik dan memastikan bahwa laporan keuangan mereka dapat dimengerti dan dinilai oleh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum. Akuntansi sektor publik berperan penting dalam mendukung transparansi, pertanggungjawaban, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan entitas public (Ryan et al., 2013).

Belinda dan Costari (Nevi Costari & Putri Ariella Belinda, 2021) menuliskan bahwa ruang lingkup akuntansi sektor publik mencakup semua lembaga pemerintah dan organisasi nirlaba. Hubungan akuntansi sektor publik sangat erat dengan penerapan dan perlakuan khusus dalam ranah publik. Sifat sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta yang lebih terbatas. Perluasan ruang lingkup sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh keragaman dan bentuk organisasi di dalamnya, tetapi juga terkait dengan lingkungan kompleks yang memengaruhi berbagai lembaga publik. Dalam konteks kelembagaan, sektor publik mencakup instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, bersama dengan unit kerja pemerintah, perusahaan publik termasuk BUMN dan BUMD, organisasi dan lembaga, organisasi politik dan massa, LSM, dinas kesehatan, perguruan tinggi, dan organisasi nirlaba lainnya. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat pula dilakukan oleh sektor swasta, seperti layanan telekomunikasi, pemungutan pajak, pendidikan, dan transportasi umum. Meskipun demikian, keberadaan sektor publik tetap tidak dapat digantikan dalam fungsi-fungsi tertentu, seperti birokrasi pemerintah. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik memiliki perbedaan signifikan dengan akuntansi sektor swasta dalam beberapa aspek.

Akuntansi sektor publik berperan sebagai alat informasi yang memiliki dualitas fungsi, menjadi instrumen manajemen bagi pemerintah serta memberikan

informasi kepada public (Rosana & Bharata, 2023). Dalam konteks pemerintah, informasi akuntansi menjadi landasan untuk pengendalian manajemen yang meliputi berbagai tahapan, mulai dari perencanaan strategis, pembuatan program, proses penganggaran, hingga evaluasi dan pelaporan kinerja. Data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi memungkinkan pemerintah untuk mengelola sumber daya secara efisien, memprioritaskan alokasi anggaran, dan mengevaluasi pencapaian tujuan strategis. Selain itu, informasi akuntansi sektor publik juga menjadi alat transparansi dan akuntabilitas kepada publik, memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan dana publik serta hasil yang dicapai oleh pemerintah dalam pelaksanaan program dan kebijakan (Arif & Firmansyah, 2024). Dengan demikian, akuntansi sektor publik bukan hanya sebagai alat manajemen internal pemerintah, tetapi juga sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

American Accounting Association (Biduri, 2020) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik, yaitu : Pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya yang dapat diandalkan secara tepat, efisien, dan ekonomis. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*). Pengendalian manajemen melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya dan kegiatan pemerintah. Informasi yang dihasilkan melalui akuntansi membantu pemerintah untuk merencanakan anggaran, mengorganisasi penggunaan sumber daya, dan mengawasi kinerja agar sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan adanya informasi akuntansi yang akurat dan terkini, pemerintah dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan alokasi sumber daya tambahan, mengoptimalkan penggunaan dana publik, serta mengevaluasi efisiensi dan ekonomisasi berbagai program dan proyek (SoM, 2023). Oleh karena itu, pengendalian manajemen yang didukung oleh akuntansi sektor publik bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat dilakukan dengan tepat dan efisien, sehingga mencapai hasil yang optimal bagi masyarakat.

Kedua, memberi manajer sebuah informasi yang memungkinkan mereka untuk melaporkan pelaksanaan tugas, mengelola program dan penggunaan sumber daya, dan memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik tentang hasil operasi dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*). Akuntabilitas dalam konteks ini juga melibatkan kemampuan pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik tentang hasil operasi dan penggunaan dana publik. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi memberikan dasar yang transparan dan akurat, memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk memahami dan menilai kinerja pemerintah serta bagaimana dana publik digunakan. Dengan adanya akuntabilitas, sektor publik diharapkan dapat memberikan pertanggungjawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap kebijakan, program, dan pengelolaan sumber daya. Tujuan ini menciptakan suatu lingkungan di mana pemerintah dapat dipercaya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, memperkuat transparansi, dan membangun kepercayaan terhadap pengelolaan dana publik.

A. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik:

1. Berdasarkan Basis Akrua: Akuntansi sektor publik umumnya menerapkan basis akrual, di mana transaksi dicatat pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau disampaikan. Hal ini memungkinkan laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang lebih akurat (Fernisia et al., 2024).

2. **Transparansi dan Akuntabilitas** : Salah satu prinsip utama dalam akuntansi sektor publik adalah transparansi, yang mengharuskan entitas pemerintah untuk menyajikan informasi keuangan yang jelas dan terbuka kepada publik (Nurohmayni Putri, 2024). Akuntabilitas juga menjadi kunci, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik (Pratiwi & Ningsih, 2023).
3. **Regulasi dan Standar** : Akuntansi sektor publik diatur oleh berbagai regulasi dan standar akuntansi yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah dan organisasi profesi. Di Indonesia, salah satu standar yang digunakan adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur bagaimana pemerintah menyusun laporan keuangan .

B. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

1. **Pelaporan Keuangan**: Menyediakan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, legislator, dan lembaga pengawas. Laporan ini meliputi laporan posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas.
2. **Pengelolaan Sumber Daya** : Membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya keuangan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif.
3. **Evaluasi Kinerja** : Memfasilitasi evaluasi kinerja program-program pemerintah melalui analisis laporan keuangan, sehingga memungkinkan identifikasi area yang perlu diperbaiki (Indra, 2019).

C. Tantangan dalam Akuntansi Sektor Publik

Meskipun sektor akuntansi publik memiliki tujuan dan karakteristik yang jelas, terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi, seperti:

1. **Keterbatasan Sumber Daya** : Banyak instansi pemerintah yang kekurangan tenaga ahli yang dilatih dalam bidang akuntansi.
2. **Kompleksitas Regulasi** : Peraturan yang sering berubah dapat menyulitkan pelaksanaan akuntansi yang efektif.
3. **Kurangnya Teknologi** : Infrastruktur teknologi yang tidak memadai dapat menghambat kemampuan dalam menerapkan sistem akuntansi yang modern (Welly Welly, Anggrelia Afrida, 2024).

Implementasi

Belinda dan Costari (Nevi Costari & Putri Ariella Belinda, 2021) menuliskan bahwa implementasi adalah pelaksanaan tindakan atau rencana yang cermat dan rinci, serta biasanya terjadi setelah rencana dianggap sempurna. Dari pengertian ini diketahui bahwa implementasi merujuk pada tahap pelaksanaan tindakan atau rencana yang telah dirancang secara cermat dan rinci. Proses ini biasanya terjadi setelah rencana dianggap telah mencapai tingkat kematangan yang memadai. Implementasi melibatkan langkah-langkah konkret dalam menerapkan ide atau konsep ke dalam praktik nyata. Hal ini dapat mencakup pengkodean perangkat lunak, pelaksanaan kebijakan, atau pelaksanaan proyek tertentu. Keberhasilan implementasi bergantung pada koordinasi yang baik, manajemen sumber daya yang efisien, dan pemantauan terus-menerus terhadap progresnya. Pada umumnya, implementasi mencerminkan fase penting dalam

siklus perencanaan dan eksekusi, di mana perhatian terhadap detail dan kesiapan rencana menjadi kunci dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Belinda dan Costari (Nevi Costari & Putri Ariella Belinda, 2021) beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi yang dijelaskan sebagai berikut :

Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan suatu proses dimana seorang pengirim informasi mentransmisikan pesan kepada seorang penerima atau audiensnya. Sementara itu, ketentuan prosedur dalam komunikasi mengacu pada panduan atau aturan yang menunjukkan bagaimana suatu proses atau tindakan seharusnya dilakukan, dijelaskan oleh pembuat ketentuan kepada penyelenggara atau pelaksana prosedur tersebut (Oktaviana, 2022).

Sumber Daya (*Resources*)

Peran sumber daya dalam implementasi kebijakan sangat krusial. Hal ini berarti bahwa terlepas dari sejalas dan seketat apapun syarat dan aturan, atau seberapa tepat penyampaian ketentuan atau peraturan, jika pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tidak memiliki cukup sumber daya untuk menjalankan implementasinya dengan efektif, maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan (Ummah, 2019).

Disposisi (*Disposition*)

Disposisi bisa dikenal dengan sifat atau ciri perilaku dari para pembuat kebijakan, di mana mereka memegang peranan kunci dalam membentuk kebijakan yang sejalan dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Faktor-faktor kritis bagi mereka yang bertugas melaksanakan prosedur adalah tingkat integritas dan dedikasi yang sangat tinggi.

Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki dampak signifikan pada implementasi kebijakan, terdiri dari mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme melibatkan pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman umum selama pelaksanaan kebijakan. SOP bertujuan agar pelaksanaan prosedur tetap sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, aspek struktur birokrasi menjadi faktor penting, di mana struktur yang berlebihan atau terlalu panjang serta terfragmentasi dapat mengurangi kapasitas pemeriksaan dan menyebabkan birokrasi yang rumit, mengakibatkan operasional organisasi menjadi kurang fleksibel.

Implementasi adalah tahap penting dalam memastikan keberhasilan suatu rencana atau kebijakan. Seperti yang dijelaskan oleh Belinda dan Costari (Nevi Costari & Putri Ariella Belinda, 2021), pelaksanaan yang cermat dan rinci sangat menentukan hasil akhir dari suatu tindakan. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada perencanaan yang matang, tetapi juga pada koordinasi yang baik, ketersediaan sumber daya, disposisi positif dari para pelaksana, dan struktur birokrasi yang efisien.

Faktor-faktor seperti komunikasi yang efektif dan pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi penting untuk menjaga agar proses implementasi berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini, instansi pemerintah dan organisasi lainnya dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan mereka, sehingga dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

Dengan demikian, perhatian yang serius terhadap aspek-aspek tersebut akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terlaksananya

kebijakan yang sukses, yang pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan pembangunan.

Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah merupakan salah satu bagian dari organisasi sektor publik. Menurut Yuesti, dkk (Biduri, 2020) organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam lingkungan yang rumit dan tidak stabil. Ini berarti bahwa organisasi sektor publik beroperasi dalam konteks lingkungan yang kompleks dan tidak stabil, di mana dinamika perubahan sering terjadi. Tantangan yang dihadapi oleh organisasi sektor publik melibatkan berbagai faktor, termasuk regulasi yang berubah-ubah, tuntutan masyarakat yang dinamis, serta kebijakan pemerintah yang terus berkembang. Di lingkungan ini, organisasi sektor publik perlu memiliki kemampuan adaptasi dan responsibilitas yang tinggi untuk berhasil beroperasi dan mencapai tujuan mereka. Dalam menghadapi ketidakpastian, organisasi sektor publik juga harus mampu mengelola risiko dan membuat keputusan yang tepat waktu.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dituliskan bahwa instansi pemerintah dapat dikatakan sebagai entitas organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atau mencapai tujuan pemerintah. Setiap instansi pemerintah memiliki peran yang ditetapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, atau keamanan. Struktur organisasi instansi pemerintah umumnya terdiri dari hierarki yang jelas dan unit-unit kerja yang spesifik, memungkinkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara efisien. Otoritas dan keputusan di instansi pemerintah didasarkan pada undang-undang atau peraturan yang mengatur fungsinya. Pembiayaan untuk operasional dan program-program instansi pemerintah berasal dari anggaran pemerintah, yang mencakup berbagai aspek seperti gaji pegawai, pembelian peralatan, dan pelaksanaan proyek-proyek strategis. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, instansi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, dan mereka juga diharapkan beroperasi dengan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi untuk memastikan kepercayaan masyarakat. Melalui fungsi-fungsi dan perannya yang beragam, instansi pemerintah berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

A. Jenis-Jenis Instansi Pemerintah

1. **Instansi Pemerintah Pusat :**
Merupakan lembaga yang berada di tingkat nasional dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. Contohnya termasuk kementerian, lembaga negara, dan badan-badan pemerintah yang mengatur kebijakan di bidang tertentu, seperti kesehatan, pendidikan, dan keuangan.
2. **Instansi Pemerintah Daerah :**
Beroperasi di tingkat provinsi, kota, atau kabupaten dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat serta mengelola urusan lokal. Contohnya adalah dinas-dinas daerah, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
3. **Instansi Vertikal :**
Instansi yang memiliki hubungan langsung dengan instansi pemerintah pusat tetapi beroperasi di tingkat daerah. Contohnya adalah kantor-kantor wilayah dari kementerian tertentu.

B. Fungsi dan Tanggung Jawab

1. Pelayanan Publik: Instansi pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Kualitas layanan ini sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
2. Pengelolaan Sumber Daya: Instansi pemerintah yang mengelola sumber daya keuangan dan non-keuangan yang dimiliki oleh negara. Ini termasuk perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan aset negara.
3. Pelaksanaan Kebijakan: Instansi pemerintah bertugas melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Hal ini mencakup implementasi program-program pembangunan dan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Afra, 2023).

C. Tantangan yang Dihadapi

Instansi pemerintah seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya, antara lain:

1. Birokrasi yang Rumit: Proses yang panjang dan berbelit-belit sering kali menghambat efisiensi pelayanan.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia: Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dilatih dalam bidang tertentu dapat mempengaruhi kinerja instansi.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: mencerminkan bahwa penggunaan dana publik yang dilakukan secara transparan dan akuntabel merupakan tantangan yang terus-menerus dihadapi (Utami, 2023).

D. Peran Instansi Pemerintah dalam Akuntansi Keuangan

Instansi pemerintah memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan akuntansi keuangan sektor publik. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, serta memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, instansi pemerintah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan menyusun laporan keuangan yang akurat, instansi pemerintah dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan mereka, yang penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Laporan yang tepat waktu memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas, untuk mengakses informasi keuangan yang diperlukan untuk menilai kinerja dan efektivitas pengelolaan dana publik.

Selain itu, dengan mengikuti standar akuntansi yang ditetapkan, instansi pemerintah dapat memastikan bahwa pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan dengan cara yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini meningkatkan transparansi, karena masyarakat dapat melihat bagaimana dana publik dialokasikan dan digunakan, serta meminimalkan risiko referensi atau kebocoran anggaran.

Efisiensi dalam pengelolaan dana publik juga menjadi fokus utama. Instansi pemerintah yang menerapkan sistem akuntansi yang baik dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kinerja keuangan. Dengan demikian, peran instansi pemerintah dalam akuntansi keuangan bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pengelola yang bertanggung jawab yang memberikan kontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Secara keseluruhan, peran instansi pemerintah dalam akuntansi keuangan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel dan

transparan, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan program-program pembangunan dan pelayanan

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis deskriptif yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam dan rinci tentang suatu fenomena atau kejadian. Analisis deskriptif memfokuskan pada penggambaran dan penjelasan karakteristik suatu objek penelitian tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel (Ramdhan, 2021). Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan interpretasi dan deskripsi data terkait dengan kondisi saat ini, yang kemudian dibandingkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dan data yang terhimpun kemudian dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan analisis data untuk akhirnya menyimpulkan hasil penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang jelas dan komprehensif mengenai implementasi akuntansi keuangan pada instansi pemerintah serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai dasar untuk rekomendasi penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi akuntansi keuangan pada instansi pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan dana publik dan memastikan transparansi serta akuntabilitas. Tahapan implementasi mencakup langkah-langkah konkret dan proses penerapan kebijakan atau program di sektor publik. Dalam konteks teknologi atau perangkat lunak, implementasi sering melibatkan pengkodean dan pengujian aplikasi untuk memastikan kinerja sesuai dengan kebutuhan. Namun, implementasi di sektor publik tidak terbatas pada bidang teknologi, ini juga mencakup penerapan kebijakan, strategi bisnis, atau proyek-proyek. Pentingnya implementasi yang efektif dalam sektor publik terutama terkait dengan upaya meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi pemerintahan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Proses implementasi di sektor publik melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat, pembuatan regulasi yang sesuai, dan koordinasi efektif antara berbagai level pemerintahan dan sektor terkait. Faktor kunci dalam implementasi di sektor publik melibatkan partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan keberhasilan kebijakan atau program.

Yuesti, dkk (Biduri, 2020) menuliskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah seperangkat prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan. Dalam penerapannya, pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam rangka pelaporan finansial. Hal ini berarti tujuan implementasi utama dari penerapan SAP adalah untuk meningkatkan tingkat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah. Dengan mematuhi SAP, instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi keuangan yang lebih akurat dan jelas kepada publik, pemangku kepentingan, serta pihak yang berkepentingan. Penerapan SAP juga melibatkan penggunaan basis akrual, di mana pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas diakui dalam pelaporan finansial. Pendekatan ini memungkinkan instansi pemerintah untuk memberikan gambaran yang lebih

komprehensif dan real-time tentang situasi keuangan mereka, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta menciptakan dasar yang kuat untuk pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja keuangan. Sebagai suatu pedoman, SAP membantu menciptakan standar yang konsisten dalam praktik akuntansi pemerintah, menjadikan pelaporan keuangan lebih transparan, dan memberikan landasan yang kokoh untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan instansi pemerintah secara keseluruhan (Effendy, 2021).

Kerangka teoritis ini merangkum aspek-aspek kunci yang terkait dengan akuntansi sektor publik, implementasi, dan peran instansi pemerintah. Akuntansi sektor publik, sebagai cabang akuntansi, memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup berbagai lembaga dan organisasi yang beroperasi di dalam sektor publik. Proses implementasi merujuk pada tahapan pelaksanaan tindakan atau rencana yang telah dirancang secara cermat dan rinci setelah dianggap mencapai tingkat kematangan yang memadai. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor ini memainkan peran krusial dalam menentukan sejauh mana suatu rencana dapat dijalankan dengan efektif. Komunikasi yang baik, ketersediaan sumber daya yang memadai, disposisi yang positif, dan struktur birokrasi yang efisien dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi. Selain itu, instansi pemerintah, sebagai bagian integral dari organisasi sektor publik, memegang peran sentral dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan dana publik. Sebagai penyelenggara utama, instansi pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, program, dan proyek yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, integrasi yang sinergis antara akuntansi sektor publik, implementasi yang efektif, dan peran instansi pemerintah menjadi penting dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Dito Aditia Darma Nasution Puja et al., 2019).

Belinda dan Costari (Nevi Costari & Putri Ariella Belinda, 2021) dalam pembahasannya mengungkapkan beberapa kelebihan implementasi akuntansi sektor publik dalam suatu Instansi Pemerintah yang dijelaskan sebagai berikut :

Menyajikan Laporan Akuntansi yang Berkualitas

Manfaat akuntansi sektor publik dapat dilihat dari peningkatan kualitas dan keandalan laporan akuntansi yang secara langsung terhubung dengan keuangan organisasi dalam sektor publik atau entitas pemerintah. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi standar mutu tinggi dan tata kelola yang teratur, karena hal ini melibatkan akuntabilitas kepada pemerintah di tingkat pusat dan juga masyarakat. Proses akuntansi sektor publik membutuhkan penyediaan data dan laporan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sehingga informasi keuangan dapat dipahami dengan baik oleh publik umum.

Memperbaiki Kinerja Keuangan dan Perekonomian

Keistimewaan atau ciri khusus dari suatu organisasi sektor publik harus dapat terlihat melalui penyusunan laporan keuangan yang efisien, bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan di suatu daerah dan bahkan secara umum, di tingkat nasional. Laporan keuangan yang disusun dengan baik tidak hanya mendorong peningkatan transparansi, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas terkait dengan keadaan perekonomian nasional. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP) mengarah pada sistem akuntansi pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan terperinci, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang akurat dan transparan. Proses perencanaan dan interpretasi juga menjadi lebih dapat

diandalkan karena efektivitas dalam mengelola sumber daya dan kewajiban ekonomi dapat terukur secara lebih baik.

Pemerintah Lebih Fokus pada Bidangnyanya

Pemerintah sebagai pelaksana tugas seharusnya lebih berfokus pada arahan, ketimbang memanipulasi sistem pengendalian manajemen di sektor publik. Pemerintah dan birokrasinya perlu melepaskan beberapa bidang pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Dengan melepaskan tanggung jawab pada domain-domain tersebut, organisasi atau instansi pemerintah dapat lebih berfokus dalam mengelola bidang-bidang tertentu yang terkait dengan kepentingan kelangsungan hidup banyak orang.

Membuat Masyarakat Lebih Mandiri

Penting bagi pemerintah untuk memperkuat pelayanan kepada rakyat, sebab pemerintah adalah wakil yang dipilih oleh rakyat. Meski demikian, pemerintah juga harus menciptakan kondisi di mana rakyat dapat mandiri dan berdikari. Kejelasan dan transparansi mengenai kondisi keuangan memberikan dorongan kepada rakyat untuk aktif menyelesaikan masalah mereka secara mandiri, bukan hanya bergantung pada bantuan pemerintah.

Menjadi Lebih Kompetitif

Di era modern ini, pemerintah perlu menjadikan dirinya lebih baik dan kompetitif dengan menanamkan jiwa kompetitif dalam birokrasi. Penerapan akuntansi sektor publik menjadi krusial untuk memenuhi tuntutan yang semakin kompleks, termasuk tuntutan dari para pegawai pemerintah. Mereka perlu menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan sifat akuntansi, karena hal ini mendorong mereka untuk bersaing lintas departemen. Pentingnya organisasi di sektor publik untuk mendukung dan membuat peraturan serta menyediakan barang yang dibutuhkan oleh publik juga menjadi bagian integral dari upaya menjadikan pemerintah lebih kompetitif (Kusuma, 2018).

Implementasi akuntansi keuangan pada instansi pemerintah tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai alat strategi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang baik, pemerintah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi masyarakat. Integrasi yang sinergis antara akuntansi sektor publik, implementasi yang efektif, dan peran instansi pemerintah menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Tegor et al., 2021).

Implementasi akuntansi keuangan pada instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dana publik, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas. Tahapan implementasi mencakup langkah-langkah konkret dan proses penerapan kebijakan atau program di sektor publik. Dalam konteks teknologi, implementasi sering melibatkan pengkodean dan pengujian aplikasi untuk memastikan kinerja sesuai dengan kebutuhan. Namun penerapannya di sektor publik tidak hanya terbatas pada bidang teknologi; ini juga mencakup penerapan kebijakan, strategi bisnis, atau proyek-proyek. Pentingnya implementasi yang efektif terkait erat dengan upaya meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi pemerintahan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat, pembuatan regulasi yang sesuai, dan koordinasi yang efektif antara berbagai tingkat pemerintahan dan sektor terkait.

Faktor kunci dalam implementasi di sektor publik meliputi partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan keberhasilan kebijakan atau program. Pada bagian ini, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi

pedoman penting yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan dengan menerapkan dasar akrual, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas. Penerapan SAP memungkinkan instansi pemerintah memberikan informasi keuangan yang lebih akurat dan jelas kepada publik serta pemangku kepentingan (Ridwan & Mus'id, 2019).

Keberhasilan implementasi akuntansi sektor publik sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk komunikasi yang baik, ketersediaan sumber daya yang memadai, disposisi yang positif, dan struktur birokrasi yang efisien. Selain itu, instansi pemerintah berperan sentral dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan dana publik. Dengan demikian, integrasi yang bersinergi antara akuntansi sektor publik, penyelenggaraan yang efektif, dan peran instansi pemerintah menjadi penting dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Prayoga & Yuhertiana, 2021).

Belinda dan Costari (Nevi Costari & Putri Ariella Belinda, 2021) juga mengungkapkan beberapa kelebihan dari implementasi akuntansi sektor publik. Pertama, implementasi ini menyajikan laporan akuntansi yang berkualitas, sehingga laporan keuangan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Kedua, akuntansi sektor publik dapat memperbaiki kinerja keuangan dan perekonomian, memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan perekonomian nasional. Ketiga, pemerintah dapat lebih fokus pada bidang-bidang yang penting, melepaskan tanggung jawab pada domain yang dapat dikelola oleh masyarakat. Keempat, dengan adanya transparansi, masyarakat terdorong untuk lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah. Terakhir, pemerintah menjadi lebih kompetitif, mampu memenuhi tuntutan yang semakin kompleks dan bersaing lintas departemen.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan akuntansi keuangan pada instansi pemerintah tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang baik, pemerintah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi masyarakat. Integrasi yang sinergis antara akuntansi sektor publik, implementasi yang efektif, dan peran instansi pemerintah menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi sistem akuntansi keuangan yang baik oleh instansi pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif semata, melainkan juga sebagai bukti nyata dari komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang krusial. Sistem ini memiliki peran strategis dalam membentuk lingkungan yang akuntabel, transparan, dan efisien dalam pengelolaan dana publik. Dengan menggunakan instrumen akuntansi yang canggih, instansi pemerintah dapat memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai penggunaan dana, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan standar tata kelola yang berlaku. Lebih dari sekadar kepatuhan administratif, penerapan sistem akuntansi keuangan yang baik juga menciptakan dasar yang kuat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Meskipun demikian, tantangan teknis dan kebutuhan adaptasi terus menjadi bagian dari perjalanan implementasi yang perlu diatasi dengan bijaksana.

Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya tata kelola keuangan yang baik di sektor publik, yang bukan hanya menjadi tanggung jawab administratif semata, tetapi juga merupakan fondasi yang mendukung kepercayaan masyarakat.

Dengan menjalankan sistem akuntansi keuangan yang baik, instansi pemerintah dapat membuktikan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang menciptakan lingkungan yang akuntabel, transparan, dan efisien dalam pengelolaan dana publik. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa instansi pemerintah seringkali menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan, seperti regulasi yang kompleks, ketidakjelasan prosedur, dan kebutuhan akan sumber daya yang memadai.

Implementasi akuntansi keuangan yang baik pada instansi pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dengan sistem akuntansi yang transparan, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan dana, sehingga membangun kepercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, penerapan sistem akuntansi yang efisien tidak hanya mengoptimalkan alokasi sumber daya, tetapi juga meningkatkan kinerja keuangan instansi pemerintah. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengelola dana dengan lebih efektif, memastikan bahwa setiap sumber daya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya transparansi dalam laporan keuangan, masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Keberadaan informasi yang akurat dan terbuka mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya

Keterbatasan dari penelitian ini adalah fokus penelitian terbatas pada implementasi akuntansi keuangan pada instansi pemerintah, tanpa mempertimbangkan perbedaan konteks dan karakteristik antar instansi pemerintah. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi generalitas hasil penelitian terhadap berbagai konteks pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga tidak merinci solusi konkret untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi akuntansi keuangan di sektor publik. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan mungkin kurang spesifik dan dapat memerlukan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi solusi yang lebih mendalam dan sesuai dengan kebutuhan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan praktik akuntansi keuangan yang baik di sektor publik dan mendukung terciptanya tata kelola yang lebih baik di instansi pemerintah.

KESIMPULAN

Dalam menerapkan konsep, rencana, atau solusi di sektor publik, langkah-langkah konkret memerlukan pendekatan terstruktur. Koordinasi efektif, pembentukan tim beragam, dan penetapan peran anggota tim menjadi tahap awal yang krusial. Manajemen sumber daya, termasuk alokasi anggaran dan pemantauan yang matang, menjadi langkah berikutnya untuk optimalisasi pemanfaatan. Evaluasi berkelanjutan juga menjadi integral dalam proses, membantu mengidentifikasi perbaikan, memastikan proyek sesuai tujuan, dan selaras dengan akhir yang diinginkan. Perhatian khusus diberikan pada faktor-faktor pengaruh, terutama melibatkan komunikasi yang baik antar stakeholder. Pengelolaan sumber daya, baik finansial maupun manusia, harus dipertimbangkan dengan matang, dan disposisi individu diakomodasi untuk mengatasi potensi resistensi atau ketidaksesuaian. Dalam mengurus sektor keuangan publik, instansi pemerintah memiliki peran ganda sebagai penyelenggara pelayanan publik dan administrator dana yang berasal dari pajak serta pendapatan negara. Signifikansi dari tata kelola keuangan yang baik di sektor publik tidak hanya bersifat

administratif semata, melainkan juga menjadi pondasi esensial untuk membangun kepercayaan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan tugas ini melibatkan upaya maksimal dalam menjalankan sistem akuntansi keuangan yang transparan dan efisien. Seiring dengan itu, komitmen terus-menerus untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang akuntabel. Walaupun begitu, tantangan kompleks seperti regulasi yang rumit dan kebutuhan akan sumber daya yang memadai tetap menjadi kendala yang perlu diatasi dalam menjalankan tugas-tugas keuangan publik.

REFERENSI

- Afra, F. (2023). *Instansi Adalah: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Contohnya*. Detik Finance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6934912/instansi-adalah-pengertian-jenis-fungsi-dan-contohnya>
- Anggraini, A. M., Sari, R. M., & Fristiani, N. (2020). Implementasi Metode Balanced Scorecard Sebagai Tolok Ukur Pengukuran Kinerja Pada Organisasi Sektor Publik. *Jca (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 1(2), 58. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v1i2.1399>
- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Akuntansiku*, 3(1), 15–29. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.630>
- Biduri, S. (2020). Akuntansi Sektor Publik. In *Akuntansi Sektor Publik* (Issue 25). <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-20-1>
- Dito Aditia Darma Nasution Puja, Rizqy Ramadhan, & Mika Debora Br. Barus. (2019). Audit Sektor Publik: Mahir dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Public Sector Accounting View project Accounting View project Dito Aditia Darma Nasution. In *Universitas Pembangunan Panca Budi* (Issue October 2020). <https://www.researchgate.net/publication/337717140>
- Effendy, S. (2021). *Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua*. CV Batam Publisher.
- Fernisia, M., Siboro, S. F., Ningrum, P. P., & Dwiyantri, S. (2024). Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Dalam Pelaporan Keuangan Sektor Publik (Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih 2022). *Trilogi Accounting and Business Research*, 5(1), 5–6. <https://doi.org/10.31326/tabr.v5i1.2048>
- Indra, B. (2019). Akuntansi Sektor Publik. *Akuntansi Sektor Publik*, 1–52.
- Kamal. (2023). *Akuntansi Sektor Publik: Pengertian Menurut Ahli, Tujuan, Jenis*. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/akuntansi-sektor-publik/>
- Kusuma, R. A. (2018). *5 Kelebihan Akuntansi Sektor Publik Terlengkap Beserta Penjelasannya*. Dosen Akuntansi. <https://dosenakuntansi.com/kelebihan-akuntansi-sektor-publik>
- Nevi Costari, & Putri Ariella Belinda. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421
- Nurohmayni Putri. (2024). Analisis Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Lampung. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 01–04. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v1i2.680>
- Oktaviana, F. R. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi aplikasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2453–2465. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2737>
- Pratiwi, P. S., & Ningsih, S. (2023). Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pelayanan Publik di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur Tahun 2020. *PANDITA : Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 5(1), 44–50. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v5i1.41>

- Prayoga, F. M., & Yuhertiana, I. (2021). Studi Literatur Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-Budgeting dalam Sektor Publik. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 5(2), 68. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n2.p68-79>
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian* (A. A. Effendi (ed.); Pertama). Cipta Media Nusantara.
- Ridwan, M., & Mus'id, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas Di Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), 222. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i2.6164>
- Rosana, L., & Bharata, R. W. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnalku*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i1.366>
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2013). Sektor Publik. In *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*.
- SoM, P. (2023). *Akuntansi Sektor Publik: Pengertian, Karakteristik dan Jenis*. PPM SCHOOL OF MANAGEMENT INSPIRING TRANSFORMATION. <https://ppmschool.ac.id/akuntansi-sektor-publik/>
- Tegor, T., Juliza, Yusmalina, Y., & Haqiqi, F. (2021). PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI DAN KUALITAS APARATUR TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun). *Jurnal Cafeteria*, 2(1), 13–24. <https://doi.org/10.51742/akuntansi.v2i1.276>
- Ummah, M. S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBTUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Utami, P. (2023). Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 6(2), 1–9. <https://doi.org/10.54783/japp.v6i2.726>
- Welly Welly, Anggrelia Afrida, M. P. (2024). *Akuntansi Sektor publik*. CV Gita Lentera.

Copyright Holder:

© Evi Susanti et al., (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA